

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak dan pelaksanaan perjanjian bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap pengaturan ekspor-impor antara Indonesia dan Jepang. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah mekanisme liberalisasi tarif, aturan asal barang (Rules of Origin), serta program peningkatan kapasitas industri (MIDEC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IJEPA menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural, seperti kompleksitas prosedur Surat Keterangan Asal (COO), hambatan non-tarif (NTMs), serta tingginya standar Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang diterapkan Jepang. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemanfaatan tarif preferensial oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Penelitian menyimpulkan bahwa untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan modernisasi sistem administrasi melalui digitalisasi, harmonisasi regulasi, serta pendampingan teknis intensif bagi industri nasional agar memenuhi standar kualitas internasional. Langkah ini krusial untuk memastikan IJEPA memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi Indonesia.

Kata Kunci: IJEPA, Perjanjian Bilateral, Ekspor Impor, Rules of Origin, Hambatan Non-Tarif.